

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di masa mendatang.

Palangka Raya, Mei 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB V PENUTUP	45

RANCANGAN AKHIR

R E N J A

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam tahun anggaran 2020 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program tahun anggaran 2020, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2018 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD

Pada tahun Anggaran 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 19.019.727.926,-** (Sembilan belas milyar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp. 8.831.947.796,-** (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan enam rupiah) dan Belanja Langsung (BL) **Rp. 10.187.780.130,-** (Sepuluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.496.255.130	4.177.397.372	92,91	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.989.000	99,78	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148.292.880	110.798.333	74,72	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	632.000.000	477.331.250	75,53	100
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3.000.000	0	0,00	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	28.008.600	93,36	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.397.138.000	2.297.860.000	95,86	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.000.700	66.998.050	100,00	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	100,00	100
	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000	34.999.475	100,00	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	20.000.000	100,00	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	22.150.000	88,60	100
	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	20.000.000	100,00	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	307.154.300	305.246.405	99,38	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000	219.996.800	100,00	100
	Rujukan berobat PNS	21.400.000	20.600.000	96,26	100
	Rapat Koordinasi/Konsultasi/Rakernis	416.270.000	399.879.459	96,06	100
	Pengembangan dan Pengelolaan	108.999.250	108.540.000	99,58	100

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Website Kantor				
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>1.031.250.000</i>	<i>1.010.308.532</i>	<i>97,97</i>	<i>100</i>
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	771.500.000	751.201.00	97,37	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	74.746.000	99,66	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146.000.000	145.666.532	99,77	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	38.750.000	38.695.000	99,86	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>461.025.000</i>	<i>455.163.600</i>	<i>98,73</i>	<i>100</i>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	296.025.000	290.500.000	98,13	100
	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	100.000.000	99.771.700	99,77	100
	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah	65.000.000	64.891.700	99,83	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>445.000.000</i>	<i>437.667.748</i>	<i>98,35</i>	<i>100</i>
	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	49.801.609	99,60	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000	144.313.961	96,21	100
	Pendataan kebutuhan pelatihan dasar	100.000.000	98.992.178	98,99	100
	Bimtek Kewaspadaan Dini	145.000.000	144.560.000	99,70	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<i>64.250.000</i>	<i>63.786.000</i>	<i>99,28</i>	<i>100</i>
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.377.000	7.312.000	99,12	100
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.873.000	10.474.000	96,33	100
	Penyusunan RKA-SKPD	9.150.000	9.150.000	100,00	100
	Penyusunan LAKIP	20.150.000	20.150.000	100,00	100
	Penyusunan renja SKPD	9.150.000	9.150.000	100,00	100
	Penyusunan LKPJ dan LPPD	7.550.000	7.550.000	100,00	100
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<i>790.000.000</i>	<i>784.790.720</i>	<i>99,34</i>	<i>100</i>
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100.000.000	99.236.000	99,24	100
	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan	65.000.000	64.208.000	98,78	100
	Pembuatan database linmas se-Kalteng	250.000.000	247.987.170	99,19	100
	Pemantauan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/ Pileg/Pilpres	75.000.000	74.675.000	99,57	100
	Pengawasan Pelaku Usaha	300.000.000	298.684.550	99,56	100
	JUMLAH	<i>10.187.780.130</i>	<i>9.606.044.834</i>	<i>94,29</i>	<i>100</i>

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2018 khususnya yang bersumber dana APBD untuk Belanja Langsung (BL) dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **94,29 %** (Sembilan puluh delapan koma enam puluh enam persen) dan Prosentase fisik mencapai **100 %** (seratus persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 318.857.758,-** (Tiga ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau **7,09 %** (tujuh koma nol sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 20.941.468,-** (Dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau **2,03 %** (dua koma nol tiga persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 5.861.400,-** (Lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau **1,27 %** (satu koma dua puluh tujuh persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.332.252,-** (Tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atau **0,01 %** (nol koma nol satu) persen dari pagu anggaran yang tersedia.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 464.000,-** (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau **0,72 %** (nol koma tujuh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia..
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdapat sisa anggaran **Rp. 5.209.280,-** (Lima juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau **0,65 %** (nol koma enam puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, terdapat sisa anggaran **Rp. 223.069.138,-** (Dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) atau **7,69 %** (tujuh koma enam sembilan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2019				
					Target Renja PD 2018	Realisasi Renja PD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
1	05												
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI											
1	1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirannya surat menyurat dan pembelian materai	600	200	100	100	100	200	33.33	
1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan jasa telepon, listrik dan akses internet	18	6	3	3	100	3	6	33.33
1	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	64	9	8	8	0	11	19	29.69
1	05	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya asuransi bangunan gedung kantor	12	4	2	2	100	2	4	33.33
1	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	86	24	13	13	100	13	26	30.23

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalteng dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah ;
2. Terciptanya kompetensi dan Profesionalisme Satpol-PP;
3. Terciptanya kesadaran dan Partisipasi kemandirian Masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya;
4. Meningkatnya struktur kedisiplinan dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
5. Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan;
6. Terciptanya kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

7. Terciptanya rasa aman, tentram dan terlindungnya hak dan kewajiban Masyarakat;
8. Terkoordinasinya Potensi Linmas yang ada di kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Masyarakat aman dan tentram dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 2) Kompetensi dan profesionalisme Satpol PP terhadap Masyarakat;
- 3) Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 4) Struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- 5) Pengembangan serta pemahaman masyarakat terhadap wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 6) Memelihara Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Memelihara Keamanan, ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan bagi masyarakat.
- 8) Partisipasi Masyarakat, Instansi terkait dalam Penyelenggaraan Program Perlindungan Masyarakat dan peran serta Linmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program / kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 7 (tujuh) Program dan 58 (lima puluh delapan) Kegiatan.

1. Dana APBD Provinsi

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan Jaringan Internet 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor 10) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 11) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13) Penyediaan makanan dan Minuman 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah 16) Biaya pembayaran instruktur senam 17) Rujukan berobat PNS 18) Rapat Koordinasi/Konsultasi/Rakernis 19) Penyediaan jasa tenaga kontrak 20) Pengembangan dan pengelolaan website kantor

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 2) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3) Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya 4) Rapat koordinasi optimalisasi penegakan peraturan daerah 5) Pelaksanaan Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan lainnya dalam penguatan peran dan fungsi Satpol PP 6) Rapat Koordinasi Gelar Perkara dan Pembinaan Aparat PPNS Satpol PP secara Berkala
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3) Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar 4) Bimtek kewaspadaan dini 5) Kesamaptaan 6) Penyuluhan Penegakan Perda dan Pergub 7) Pembinaan Kedisiplinan Anggota Satpol PP 8) Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP 9) Bimbingan Teknis Pemberkasan, Teknik Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3) Penyusunan RKA-PD 4) Penyusunan LAKIP 5) Penyusunan Renja PD 6) Penyusunan LKPJ dan LPPD 7) Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu

6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan 3) Pembuatan Database Linmas se-Kalteng 4) Pemantauan Fungsi Linmas Dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/ Pileg/ Pilpres 5) Pembinaan Pelaku Usaha 6) Pembuatan Database Daerah Potensi Rawan Bencana se-Kalteng
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 2) Penegakan Pelaksanaan Perda/ Pergub di Kabupaten /Kota Provinsi Kalimantan Tengah. 3) Inventarisasi Data Perundangan/ Perda/ Pergub 4) Koordinasi dan Kerjasama Kantrantibmas Terpadu 5) Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial 6) Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 7) Pengamanan Barang Bukti

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (terlampir dalam Tabel 4.1)

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05 - 1.5.0201 - 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				13.118.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat dan Pembelian Materai	Provinsi Kalimantan Tengah	100 Surat/Paket	5.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan Jaringan Internet	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Rekening	145.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	10 Jenis	650.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	2 gedung	3.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Tengah	15 stnk	40.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Tengah	170 orang	625.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor dan perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Tengah	3 orang	135.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya biaya jasa service peralatan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	6 jenis	30.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alata Tulis Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	50 Jenis	50.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.11	Penyediaan jas barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	7 Jenis	30.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Provinsi Kalimantan Tengah	6 Jenis	20.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran bagi pegawai	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Jenis	25.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Bagi Tamu kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	100 Jenis	28.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Provinsi	60 Dok	685.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	80 Dok	560.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05 - 1.5.0201 - 1.24	Biaya pembayaran instruktur senam	Terlaksana Kegiatan Senam Kesegaran jasmani ASN Satpol PP Prov. Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	12.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.35	Rujukan berobat PNS	Terpenuhinya jaminan kesehatan berobat bagi PNS	Luar Provinsi	5 orang	25.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.38	Rapat Koordinasi / Konsultasi / Rakernis	Terpenuhinya rapat koordinasi /konsultasi/rakernis Pol PP 14 Kab/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	60 Orang	450.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.70	Penyediaan jasa tenaga kontrak	Terlaksana pembayaran gaji dan bpjs tenaga kontrak Satpol PP Prov Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	300 Orang	9.350.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 1.71	Pengembangan dan pengelolaan website	Terlaksana Media Informasi online Satpol PP Prov.Kalteng yang up to date	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	250.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				570.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	4 gedung	300.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Provinsi Kalimantan Tengah	10 unit	250.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	12 jenis	20.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.255.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian dinas pegawai, tenaga kontrak, dan cleaning service Satpol PP.	Provinsi Kalimantan Tengah	306 orang	550.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Kalimantan Tengah	306 orang	85.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3.14	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	7 kali	220.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3.15	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi optimalisasi penegakan Peraturan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	175.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3.16	Pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal dan lainnya dalam penguatan peran dan fungsi Satpol PP	Terlaksananya Pelaksanaan Kerja sama dng Instansi Vertikal	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	125.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 3.17	Rapat koordinasi gelar perkara dan pembinaan aparat PPNS Satpol PP secara berkala	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.450.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05 - 1.5.0201 - 5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai satpol pp	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	60.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.3	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	50 orang	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.116	Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar	Terselenggaranya pendataan Diksar di 14 Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.144	Bimtek kewaspadaan dini	terlaksananya Bimtek kewaspadaan dini	Provinsi Kalimantan Tengah	50 orang	160.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Kesamaptaan	Meningkatnya keterampilan , fisik dan akhlak aparatur Satpol PP	Provinsi Kalimantan Tengah	100 orang	350.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Penyuluhan penegakan Perda dan Pergub	Terlaksananya Koordinasi Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP dari Kab/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	200.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Pembinaan kedisiplinan anggota Satpol PP	Terselenggaranya Pembinaan Internal Kedisiplinan Anggota Satpol PP	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	80.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Pengembangan kapasitas anggota Satpol PP	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP melalui Pembinaan Peraturan Baris Berbaris (PBB)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 5.147	Bimbingan teknis pemberkasan, teknik pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli	Terpenuhinya teknis pemberkasan, teknik pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli bagi PPNS Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	300.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				208.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terpenuhinya Laporan realisasi keuangan semesteran	Provinsi Kalimantan Tengah	2 dokumen	8.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	11.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.6	Penyusunan RKA-SKPD	Terpenuhinya Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	2 dokumen	22.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.14	Penyusunan LAKIP	Terpenuhinya Penyusunan LAKIP dalam capaian Kinerja	Provinsi Kalimantan Tengah	4 dokumen	25.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.15	Penyusunan Renja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan program kerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	2 dokumen	22.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Terpenuhinya Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	2 dokumen	20.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 6.67	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu	Terwujudnya PPID Pembantu di Sat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05 - 1.5.0201 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				895.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	100 orang	310.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 15.23	Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan	Terciptanya kesadaran masyarakat dilingkungan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kantibmas maupun bencana	Provinsi Kalimantan Tengah	50 orang	125.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 15.29	Pembuatan Database anggota linmas	tersedianya data base anggota linmas sekalimantan tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	75.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 15.31	Pemantauan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/Pileg/Pilpres	Terlaksananya pemantauan fungsi Linmas dalam pelaksanaan Pilkada / Pileg / Pilpres	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	200.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 15.34	Pembinaan Pelaku Usaha	Pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	100.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 15.36	Pembuatan database daerah potensi rawan bencana se-Kalteng	Terpenuhinya pembuatan Data Base Daerah Potensi Rawan Bencana se- Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	1 dokumen	85.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				3.085.000.000	
1.05 - 1.5.0201 - 16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP, aset dan pejabat-pejabat Pemprov Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	120 orang	700.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.8	Penegakan pelaksanaan perda/pegub di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah	Terpenuhinya kegiatan penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	1.200.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.24	Inventarisasi Data Perundangan/Perda/Pergub	Tersusunnya data-data Perda/Pergub Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	770.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.26	Koordinasi dan kerjasama kantrantibmas terpadu	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kantrantibmas dengan instansi terkait 14 kab/kota	Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	135.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.29	Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial	Terlaksananya pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial di masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	65.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.30	Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya penegakan kantrantibmas di lingkungan masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	20 kali	65.000.000	APBD
1.05 - 1.5.0201 - 16.29	Pengamanan Barang Bukti	Terlaksananya pengamanan barang bukti di TKP	Provinsi Kalimantan Tengah	30 kali	150.000.000	APBD
JUMLAH TOTAL					20.581.000.000	

Catatan Penting	Rencana Tahun 2020	
	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(8)	(9)	(10)
		15.085.700.000
	100 Surat/Paket	5.750.000
	3 Rekening	166.750.000
	10 Jenis	747.500.000
	2 gedung	3.450.000
	15 stnk	46.000.000
	170 orang	718.750.000
	3 orang	155.250.000
	6 jenis	34.500.000
	50 Jenis	57.500.000
	7 Jenis	34.500.000
	6 Jenis	23.000.000
	3 Jenis	28.750.000
	100 Jenis	32.200.000
	60 Dok	787.750.000
	80 Dok	644.000.000

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1.	SKPD. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			20.581.000.000	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			13.118.000.000	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalteng	Terkirimnya surat menyurat dan pembelian materai	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jaringan Internet	Provinsi Kalteng	Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan Jaringan Internet	145.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	650.000.000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Provinsi Kalteng	Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor dan terjadinya keutuhan gedung kantor	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Kalteng	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas/operasional	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan dan barang	625.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Kalteng	Terbayarnya honor petugas kebersihan kantor dan perlengkapannya	135.000.000	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Provinsi Kalteng	Terbayarnya biaya jasa service peralatan kantor	30.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya alat tulis kantor	50.000.000	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	30.000.000	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya komponen listrik/Lancarnya penerangan bangunan kantor	20.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya bahan bacaan koran bagi pegawai	25.000.000	
	Penyediaan makanan dan Minuman	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman bagi tamu kantor	28.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	685.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Provinsi Kalteng	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	560.000.000	
	Biaya pembayaran instruktur senam	Provinsi Kalteng	Terlaksana Kegiatan Senam Kesegaran jasmani ASN Satpol PP Prov. Kalteng	12.000.000	
	Rujukan berobat PNS	Luar Provinsi	Tersedianya dana rujukan berobat PNS ke luar daerah	25.000.000	
	Rapat Koordinasi / Konsultasi / Rakernis	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya rapat koordinasi/konsultasi/rakernis Pol PP 14 kab/kota	450.000.000	
	Penyediaan jasa tenaga kontrak	Provinsi Kalteng	Terlaksana pembayaran gaji dan bpjs tenaga kontrak Satpol PP Prov Kalteng	9.350.000.000	
	Pengembangan dan pengelolaan website	Provinsi Kalteng	Terlaksana Media Informasi online Satpol PP Prov.Kalteng yang up to date	250.000.000	
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			570.000.000	
	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	300.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			1.255.000.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas pegawai, tenaga kontrak, dan cleaning service Satpol PP	550.000.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	85.000.000	
	Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	Provinsi Kalteng	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya	220.000.000	
	Rapat Koordinasi Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Provinsi Kalteng	Terlaksananya rapat koordinasi optimalisasi penegakan Peraturan Daerah	175.000.000	
	Pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal dan lainnya dalam penguatan peran dan fungsi Satpol PP	Provinsi Kalteng	Terlaksananya Pelaksanaan Kerja sama dng Instansi Vertikal	125.000.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rapat koordinasi gelar perkara dan pembinaan aparat PPNS Satpol PP secara berkala	Provinsi Kalteng	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lainnya	100.000.000	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			1.450.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi Kalteng	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai Satpol PP	60.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalteng	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000	
	Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar	Provinsi Kalteng	Terselenggaranya pendataan Diksar di 14 Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Bimtek Kewaspadaan Dini	Provinsi Kalteng	Terlaksananya Bimtek Kewaspadaan Dini	160.000.000	
	Kesamaptaan	Provinsi Kalteng	Jumlah Aparatur Satpol PP Sehat, berkualitas dan berakhlak	350.000.000	
	Penyuluhan penegakan Perda dan Pergub	Provinsi Kalteng	Terlaksananya Koordinasi Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP dari Kab/Kota	200.000.000	
	Pembinaan kedisiplinan anggota Satpol PP	Provinsi Kalteng	Terselenggaranya Pembinaan Internal Kedisiplinan Anggota Satpol PP	80.000.000	
	Pengembangan kapasitas anggota Satpol PP	Provinsi Kalteng	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP melalui Pembinaan Peraturan Baris Berbaris (PBB)	100.000.000	
	Bimbingan teknis pemberkasan, teknik pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya teknis pemberkasan, teknik pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli bagi PPNS Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah	300.000.000	
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			208.000.000	
	Penyusunan Lapoaran Keuangan Semesteran	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Laporan realisasi keuangan semesteran	8.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Keuangan Akhir Tahun	11.000.000	
	Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Penyusunan RKA-SKPD	22.000.000	
	Penyusunan LAKIP	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Penyusunan LAKIP dalam capaian Kinerja	25.000.000	
	Penyusunan Renja SKPD	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kerja	22.000.000	
	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya Penyusunan LKPJ dan LPPD	20.000.000	
	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Pembantu	Provinsi Kalteng	Terwujudnya PPID Pembantu di Sat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	100.000.000	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			895.000.000	
	Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Provinsi Kalteng	Terlatihnya anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	310.000.000	
	Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan	Provinsi Kalteng	Terciptanya kesadaran masyarakat dilingkungannya terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana	125.000.000	
	Pembuatan Database Linmas se-kalteng	Provinsi Kalteng	Tersedianya database anggota Linmas se Kalimantan Tengah	75.000.000	
	Pemantauan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Keamanan Pilkada/Pileg/Pilpres	Provinsi Kalteng	Terlaksananya pemantauan fungsi Linmas dalam pelaksanaan Pilkada / Pileg / Pilpres	200.000.000	
	Pembinaan Pelaku Usaha	Provinsi Kalteng	Pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya	100.000.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembuatan database daerah potensi rawan bencana se-Kalteng	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya pembuatan Data Base Daerah Potensi Rawan Bencana se- Kalteng	85.000.000	
7.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			3.085.000.000	
	Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Provinsi Kalteng	Terbayarnya honorarium jaga/pengamanan VIP, aset dan pejabat-pejabat Pemprov kalteng	700.000.000	
	Penegakan pelaksanaan perda/pegub di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalteng	Terpenuhinya kegiatan Penegakan perda/pegub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	1.200.000.000	
	Inventarisasi Data Perundangan/Perda/Pegub	Provinsi Kalteng	Tersusunnya data-data Perda/Pegub Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	770.000.000	
	Koordinasi dan kerjasama kantrantibmas terpadu	Provinsi Kalteng	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kantrantibmas dengan instansi terkait 14 kab/kota	135.000.000	
	Pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial	Provinsi Kalteng	Terlaksananya pengendalian Unjuk Rasa dan Konflik Sosial di masyarakat	65.000.000	
	Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Provinsi Kalteng	Terlaksananya penegakan kantrantibmas di lingkungan masyarakat	65.000.000	
	Pengamanan Barang Bukti	Provinsi Kalteng	Terlaksananya pengamanan barang bukti di TKP	150.000.000	